

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pola perniagaan tembakau di Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola perniagaan tembakau di Kecamatan Tlogomulyo bersifat hierarkis sekaligus koordinatif.

Secara struktural, pabrikan dan grader menempati posisi dominan sebagai pengendali harga dan kualitas melalui mekanisme grading, sementara petani berada pada posisi paling rentan dalam rantai perniagaan. Namun demikian, sistem ini tidak sepenuhnya berjalan secara top-down karena terdapat aktor-aktor koordinatif seperti APTI, Gugus Tugas, dan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan penyeimbang kepentingan antar aktor.

2. Hasil analisis Stakeholder Salience menunjukkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antar aktor.

Pabrikan dan grader memiliki atribut kekuasaan, legitimasi, dan urgensi yang kuat sehingga dikategorikan sebagai stakeholder dominan. Petani berada dalam kategori stakeholder dependen karena memiliki legitimasi dan urgensi tinggi, namun kekuasaan yang terbatas. Sementara itu, APTI dan Gugus Tugas berperan sebagai aktor pendukung yang berfungsi memperkuat posisi tawar petani melalui advokasi dan koordinasi.

3. Analisis SIID memperlihatkan adanya dinamika konflik dan kolaborasi antar aktor.

Konflik utama terjadi pada isu penentuan harga dan kualitas tembakau antara petani dan pabrik/grader. Di sisi lain, terdapat relasi kolaboratif antara petani dengan APTI, Gugus Tugas, serta pemerintah daerah dalam upaya pendampingan, fasilitasi kebijakan, dan advokasi kepentingan petani. Hubungan ini bersifat dua arah dan saling memengaruhi.

4. PIM menunjukkan bahwa dukungan dan penolakan aktor sangat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan posisi tawar.

Aktor pasar cenderung mendukung kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam penentuan harga, sementara petani dan organisasi petani mendorong kebijakan yang memperkuat perlindungan dan kepastian harga. Pemerintah daerah berada pada posisi strategis sebagai penengah, namun perannya belum sepenuhnya optimal dalam mengoreksi ketimpangan struktur perniagaan.

5. Terdapat dua pola sebagai hasil akhir Pola Perniagaan Tembakau di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung yaitu Pola Distribusi Perniagaan Tembakau dan Pola Tata Kelola Perniagaan Tembakau Berbasis Stakeholder.
6. Faktor pendorong dan penghambat menunjukkan adanya tarik-menarik antara potensi dan tantangan struktural.

Kondisi alam yang mendukung, tradisi bertani, ketersediaan pasar, serta dukungan kelembagaan menjadi faktor pendorong utama perniagaan tembakau. Namun demikian, ketergantungan harga pada pabrik, keterbatasan akses modal,

fluktuasi iklim, dan lemahnya posisi tawar petani menjadi faktor penghambat yang bersifat struktural dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pola perniagaan tembakau di Kecamatan Tlogomulyo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rantai distribusi ekonomi, melainkan sebagai sistem tata kelola multi-aktor yang melibatkan relasi kekuasaan, kepentingan, dan koordinasi antar stakeholder dalam kerangka Administrasi Publik.

4.2 Saran

Adanya berbagai kendala dalam perniagaan tembakau di Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, menyebabkan belum optimalnya kesejahteraan petani tembakau serta belum maksimalnya peran masing-masing aktor dalam sistem tata niaga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran berikut:

1. Penguatan Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator dan Mediator

Pemerintah daerah perlu memperkuat perannya tidak hanya sebagai pendukung teknis, tetapi juga sebagai regulator dan mediator aktif dalam tata niaga tembakau. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan standar minimal mekanisme jual beli tembakau di tingkat lokal, fasilitasi dialog rutin antar stakeholders (petani, tengkulak, pedagang besar, dan pabrik), serta pengawasan terhadap praktik perniagaan yang berpotensi merugikan petani. Penguatan peran ini penting untuk mengurangi ketimpangan relasi kekuasaan dan menciptakan tata niaga yang lebih adil dan transparan.

2. Penguatan Kelembagaan Petani melalui APTI dan Kelompok Tani

Penjualan tembakau secara kolektif melalui APTI atau kelompok tani perlu terus didorong sebagai mekanisme satu pintu. Kelembagaan ini berfungsi untuk meningkatkan posisi tawar petani, meminimalkan praktik tidak adil oleh tengkulak, serta memperkuat tanggung jawab bersama dalam proses perniagaan. Selain itu, penguatan kelembagaan juga perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas manajerial, pencatatan transaksi, dan kemampuan negosiasi harga.

3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Transaksi

Untuk melindungi petani dari potensi kecurangan, diperlukan kesepakatan tertulis antara petani dan tengkulak atau pedagang, seperti penggunaan nota atau bukti transaksi resmi saat pengambilan tembakau. Bukti tertulis ini penting sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi perbedaan timbangan, harga, maupun keterlambatan pembayaran.

4. Peningkatan Transparansi Sistem Grading dan Penetapan Harga

Sistem grading yang diterapkan oleh pabrikasi masih menjadi sumber utama ketergantungan petani. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi kriteria grading secara terbuka, pendampingan oleh organisasi petani saat proses grading, serta penyusunan pedoman harga yang lebih mudah dipahami. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan memperkuat posisi tawar petani dalam menentukan harga jual.

5. Pengembangan Skema Kemitraan yang Lebih Adil dengan Pabrikasi

Program kemitraan antara petani dan gudang/pabrikasi perlu dirancang dengan prinsip keadilan, transparansi kontrak, serta pembagian risiko yang

proporsional. Kemitraan yang sehat dapat membantu petani memperoleh akses modal dan pasar, sekaligus menjamin pabrikan mendapatkan pasokan tembakau berkualitas tanpa memperlemah posisi petani.

6. Diversifikasi Usaha dan Inovasi Produk Tembakau

Untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur pemasaran, petani perlu didorong mengembangkan produk olahan tembakau, seperti tembakau lembutan, maupun diversifikasi usaha pertanian lainnya. Diversifikasi ini dapat menjadi strategi adaptif dalam menghadapi fluktuasi harga dan risiko gagal panen, sekaligus membuka peluang nilai tambah bagi petani.

7. Peningkatan Literasi Tata Niaga Petani

Petani perlu dibekali literasi dasar mengenai tata niaga, kontrak jual beli, risiko perniagaan, serta hak dan kewajiban dalam transaksi. Peningkatan literasi ini penting agar petani tidak hanya menjadi objek pasar, tetapi juga aktor yang sadar dan aktif dalam sistem perniagaan tembakau.

8. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji mekanisme penetapan harga dan grading tembakau dari perspektif pabrikan, menganalisis dampak kebijakan pertembakauan nasional terhadap tata niaga di tingkat lokal, atau melakukan perbandingan tata kelola perniagaan tembakau antar daerah guna memperkaya kajian Administrasi Publik di sektor pertembakauan.